## WALI NANGGROE: NEGARA HADIR LEWAT LAYANAN PUBLIK BERINTEGRITAS

Jum'at, 10 Oktober 2025 - Imanda Kartika Sari

BANDA ACEH (Waspada.id) - Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia Dadan S. Suharmawijaya didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh Dian Rubianty dan jajaran melakukan kunjungan silaturahmi dan koordinasi ke Lembaga Wali Nanggroe Aceh Kamis, (09/10/2025).

Pimpinan Ombudsman RI disambut langsung oleh Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Teungku Malik Mahmud Al Haytar yang didampingi staf khusus. Turut hadir Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Pertemuan ini menjadi ruang strategis untuk mempererat koordinasi dan sinergi antara Ombudsman RI dan Wali Nanggroe sebagai pengampu tertinggi urusan adat, agama, hukum, dan keistimewaan di Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, Dadan menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama antara Ombudsman RI dan Wali Nanggroe dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di Aceh.

"Sebagai Pimpinan Ombudsman dan Pengampu wilayah untuk Aceh, kami berharap koordinasi antara Ombudsman dan Wali Nanggroe dapat terus ditingkatkan. Aceh punya kesempatan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berkeadilan sesuai nilai-nilai syariat Islam," ujar Dadan.

Sebagai sesama pencinta sejarah, diskusi hangat hingga tiga jam kedua belah pihak juga sempat membahas peran Aceh dalam pembentukan Republik Indonesia.

Atas kesadaran sejarah itu pula penguatan kewenangan antar lembaga di Aceh dapat terus dilakukan untuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.

Kekhususan Aceh diharapkan dapat mencegah potensi penyimpangan penyenggaraan pelayanan dan pelaksanaan pengawasan pelayanan publik.

Wali Nanggroe dalam kesempatan tersebut mengajak Ombudsman untuk terus memberi masukan kepada Pemerintah Aceh agar dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berfokus pada target penyerapan anggaran namun juga harus meningkatkan upaya pembangunan kualitas masyarakat Aceh.

"Pemerintahan yang tidak berpihak pada masyarakat akan melahirkan ketimpangan sosial. Ketimpangan inilah yang menjadi cikal bakal munculnya gejolak. Karena negara hadir lewat pelayanan publik berkualitas untuk semua. Terutama untuk kelompok paling lemah dan rentan dalam masyarakat," tegasnya.

Wali Nanggroe juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk memperkuat pengawasan.

